

c. Strategi Pembangunan Berkelanjutan.

Yaitu strategi yang memandang antara masyarakat dan ekosistem disuatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi namun harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.

d. Strategi Kemandirian

Kemandirian daerah perlu dibangun sebagai upaya meningkatkan kemampuan untuk mengelola berbagai permasalahan dan tantangan serta kemampuan untuk membangun dirinya sendiri.

Sedangkan untuk mencapai kemandirian daerah perlu dibangun melalui potensi unggulan wilayah serta industri kecil dan menengah yang diharapkan memiliki produk unggulan daerah yang kompetitif baik lokal, Nasional atau yang berorientasi ekspor.

e. Strategi Pengembangan, Kelangsungan dan Perlindungan Masyarakat.

Pengembangan, kelangsungan dan perlindungan hidup adalah hak asasi setiap anggota masyarakat yang pelaksanaannya harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui upaya penegakan supremasi hukum.

Dengan ke lima strategi tersebut diatas diharapkan Repetada benar-benar merupakan kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas dan difokuskan pada permasalahan-permasalahan pokok serta mendesak untuk ditangani atau dipecahkan oleh pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Apabila dicermati secara mendalam Dokumen Repetada maupun pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan misi penyusunan Repetada pada awalnya. Pada hakekatnya Dokumen Repetada merupakan rencana kegiatan operasional tahunan masih tergolong sulit langsung untuk dioperasikan oleh Dinas, Badan, Kantor dan satuan kerja pemerintah propinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena masih ada yang abstrak, maka para pelaksana dapat memberikan tafsiran atau operasionalisasi sesuai persepsi dan kebutuhan instansinya masing-masing.

Demikian pula dalam hal prioritas pemecahan masalah, masih belum terlihat dari sektor-sektor tersebut, mempunyai skala prioritas dengan program/proyek lainnya. Hal ini penting, karena masalah-masalah pembangunan yang dibagi habis dalam program-program sektoral, sebenarnya bukanlah prioritas tapi lebih merupakan ada masalah apa dalam sektor tersebut, baru dijabarkan ke dalam program / proyek.

Alangkah lebih baik jika lebih cepat menyentuh masyarakat, dan apabila hal tersebut ada skala prioritas yang segera ditindak lanjuti oleh pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dalam jangka waktu satu tahun. Dari sisi pelaksanaan, Repetada Propinsi maupun Kabupaten/Kota keberhasilannya dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur maupun Bupati atau walikota. Ukuran ini masih sangat kental politisnya, oleh karena itu sebenarnya Repetada berhasil atau tidak untuk dilaksanakan harus diukur dengan indikator-indikator terutama seberapa